

**JURNAL ILMIAH**

**PENERAPAN ASAS RESTORATIF JUSTICE DALAM PROSES  
PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN**



Disusun Oleh :

**NICOLAS ARMAND KURNIAWAN**

<b>N P M</b>	<b>: 060509472</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program kekhususan</b>	<b>: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum</b>

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PENERAPAN ASAS RESTORATIF JUSTICE DALAM PROSES  
PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN**

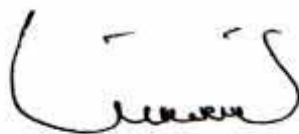


Disusun Oleh :

**NICOLAS ARMAND KURNIAWAN**

NPM	: 060509472
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal 28 Juli 2015  
Dosen Pembimbing,**



**Prof. Dr. Dra.Mg. Endang Sumiarni, SH.,H.Hum.**

# **PENERAPAN ASAS RESTORATIF JUSTICE DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**

Disusun oleh  
Nicolas Armand Kurniawan

## **ABSTRACT**

Aim of this research intended to find out an act of implementation Restorative Justice principle for children who does as a suspect of criminal act on investigation process. The method used normative law research, which it means focuson to positive law norm. like shape of legal systemation by doing, description, systematic, analisis, interpretation, and evaluate positive law, vertically and horizontally for the problem that concerned about implementation principle Restorative Justice in investigation process to children who does criminal act. In actual act, the implementation of principle Restorative Justice is not maximal. It cause the suspect of criminal thief who process at court more than 20 case. The problem faced on implementing restoration Justice is the police especially investigation not yet understand about children law.

**Keywords : children, Restorative Justice, Police and Thief.**

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tindakan implementasi prinsip keadilan restoratif bagi anak-anak yang melakukan sebagai tersangka dari tindak pidana pada proses investigasi. Metode digunakan normatif hukum penelitian, yang artinya kami Pada untuk norma hukum positif. seperti bentuk hukum systemation dengan melakukan, deskripsi, sistematis, analisis, interpretasi, dan mengevaluasi hukum positif, secara vertikal dan horizontal untuk masalah yang prihatin tentang penerapan prinsip keadilan restoratif dalam proses investigasi untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana. dalam tindakan, pelaksanaan prinsip keadilan restoratif bukanlah maksimal. Hal ini menyebabkan tersangka kriminal pencuri yang proses pengadilan lebih dari 20 kasus. Masalah yang dihadapi pada pelaksanaan restorasi keadilan adalah polisi terutama penyelidikan belum mengerti tentang hukum anak-anak.

Kata kunci : Anak-anak, keadilan restoratif, polisi dan pencuri.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya, sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Setiap anak mempunyai peran dan tanggung jawab, maka perlu mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, untuk mewujudkannya diperlukan upaya perlindungan terhadap anak.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal (2) diatur mengenai hak-hak anak yaitu:

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>2</sup>

Dari ke 4 macam-macam hak anak secara garis besar tidak semua hak anak dapat dipenuhi oleh orang tua. Anak berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan berbagai usaha salah satunya dengan melakukan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- 1) faktor ekonomi;

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN Tahun 2002 No. 109, TLN No. 4235, dalam september 2013.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, dalam *Ibid*.

- 2) faktor lingkungan;
- 3) faktor sosial;
- 4) rendahnya pemahaman agama dan moral;
- 5) faktor pendidikan;
- 6) faktor keluarga;
- 7) pengangguran dan / atau
- 8) penyakit kejiwaan yang disebut dengan kleptomania:<sup>3</sup>

Proses penyidikan terhadap anak dilakukan oleh Penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Penyidik umum tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara anak. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik adalah:

1. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
2. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan

---

<sup>3</sup>Erikwan, Yudha Thama, 2008, faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, <http://repository.unand.ac.id/10424/13> september 2013

<sup>4</sup>Pasal 41 ayat (2), Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, tentang Peradilan Anak.LN Tahun 1997. Nomor 3.TLNNo 3668, [www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/441](http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/441), 13 september 2013.

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Undang-undang ini baru diberlakukan 2 (dua) tahun sejak diundangkan yaitu tertanggal 30 juli 2014.

Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap di proses secara pidana akan tetapi harus memperhatikan hak-hak anak. Selama proses penyidikan diperlakukan asas Restoratif Justice. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dihindarkan dari pemidanaan yang berupa perampasan hak. Dalam prakteknya proses penyidikan yang dilakukan tidak semua penyidik melakukannya. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta mulai dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, jumlah anak yang diproses di tahap penyidik hingga ditingkat Pengadilan bahkan sampai dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak mencapai 28 orang.

Berdasarkan uraian tersebut, anak yang telah melakukan tindak pidana tetap diproses hingga tingkat pengadilan bahkan dititipkan di lembaga pemasyarakatan mencapai 28 orang. Oleh karena itu, penulis membahas permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam penelitian hukum dengan judul “Penerapan Asas Restoratif Justice Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.”

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan

---

Rumusan Masalah bagaimanakah penarapan asas Restoratif Justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan?

**Tujuan Penelitian:**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penarapan asas Restoratif Justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan.

**PELAKSANAAN PENERAPAN ASAS RESTORATIF JUSTICE TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN**

Data kasus pencurian anak yang dilaporkan di Polres Sleman tidak ada. Menurut narasumber Bripka Adi Suherman Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang ditangani di Polres Sleman adalah anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, pengroyokan dan pencabulan. Narasumber menjelaskan anak yang melakukan pencurian langsung ditangani di Polsek-Polsek setempat dan pihak penyidik melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan Asas Restoratif Justice terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah dilaksanakan tetapi dalam prakteknya belum maksimal, dikarenakan banyak dari korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak menghendaki diselesaikan secara kekeluargaan tetapi diselesaikan secara hukum. Terbukti dari data yang dimiliki Polres Sleman dari



tahun 2012-2013 anak yang diproses sampai tingkat pengadilan mencapai 28 orang. Dengan begitu dapat diketahui bahwa masyarakat tidak memahami penyelesaian perkara tindak pidana ringan seperti pencurian tidak harus diselesaikan secara hukum tetapi bisa diselesaikan dengan kekeluargaan.

Penyelesaian masalah dengan Penerapan Asas Restoratif Justice akan menyadarkan anak yang melakukan tindak pidana akan kesalahan mereka. Membuka kesempatan untuk berdialog antara pelaku dengan korbannya, pendekatan secara kekeluargaan seperti ini memungkinkan akan berhasil daripada mengirim anak ke pengadilan, karena dengan memproses anak sampai ke pengadilan maka tidak akan menjamin hak-hak anak tersebut, bahkan Dapat menjadikan anak tersebut menjadi lebih buruk. Sanksi yang dikenakan terhadap anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum ada dua yaitu sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran hukum ringan. Jika ingin membandingkan dengan *Restoratif Justice*, pengenaan sanksi tindakan pun harus melalui proses pemeriksaan oleh aparat hukum dan diputus oleh pengadilan. Anak akan merasa takut jika harus berhadapan dengan aparat hukum yang dalam hal ini karena kewibawaan dari penegak hukum itu sendiri. Melalui *Restoratif Justice* seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum ringan tidak perlu melalui putusan pengadilan yang dapat membuat anak takut. Apalagi anak yang diputus dengan tindakan penyerahan kepada Negara atau Departemen Sosial juga ditampung pada lembaga pemasyarakatan anak untuk dibina. Penanganan alternatif terhadap anak melalui jalur non formal seperti model *Restoratif Justice* sangat



memungkinkan untuk diterapkan terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum karena akan menjauhkan anak dari stigma jahat dan hak-hak anak akan terlindungi.

Penelitian tentang Penerapan Asas Restoratif Justice Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Sleman, dilakukan di POLRES Sleman, berdasarkan wawancara dengan Bripka (Brigadir Polisi Kepala) Adi Hermawan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) dalam proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Narasumber menjelaskan bahwa proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana telah dilakukan oleh pihak kepolisian sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yaitu penangkapan, penahanan, tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu penangkapan dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 dan penahanan dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 31. Penangkapan dilakukan guna kepentingan pemeriksaan paling lama 1 (satu) hari dan wajib ditempatkan dalam ruangan khusus pelayanan anak. Menurut narasumber kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penahanan hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari. Menurut hemat penulis dalam hal ini penyidik melakukan penangkapan dan penahanan tidak seharusnya menggunakan KUHP (Kitab Undang-undang hukum Pidana) karena penanganan anak tidak sama dengan

orang dewasa dan tidak dijelaskan secara khusus tentang Restoratif Justice, maka yang bersangkutan (penyidik) seharusnya menggunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebab Undang-Undang tersebut merupakan peraturan yang sifatnya khusus dari KUHP ( asas *lex specialis derogate legi generalis*). Namun untuk dapat melakukan penyelesaian masalah anak nakal melalui Restoratif Justice terlebih dahulu melakukan upaya diversifikasi yaitu pengalihan penanganan kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses formal yang dilakukan pihak penyidik. Menurut Bripka Adi Suherman dalam melakukan upaya diversifikasi dengan tujuan:

memberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

mencapai perdamaian antara korban dan anak.

menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.

menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Hal lain yang diperhatikan oleh pihak penyidik adalah kepentingan korban, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Penyidik juga melibatkan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Dinas Sosial (DINSOS). Pihak penyidik dalam upaya diversifikasi tidak menggunakan seragam, agar anak tidak merasa takut dan tertekan. Dari penjelasan itu narasumber menjelaskan akan menggali informasi dari pihak korban maupun pelaku dari masyarakat sekitar

tentang latar belakang anak tersebut di lingkungannya, kondisi kesehatan anak tersebut, tanggapan masyarakat terhadap perilaku, kehidupan religiusnya dan pendidikannya. Hasil penelitian atau rekomendasi dari Bapas juga diperlukan oleh penyidik dikarenakan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk kategori tindak pidana berat atau tindak pidana ringan, mengingat usia anak, anak yang bersangkutan masih sekolah atau tidak bersekolah, sangat mengkhawatirkan jika proses penyidikan dilanjutkan sampai ke pengadilan dan yang terjadi hak-hak anak akan hilang dan anak akan mengalami tekanan psikologis. Hasil penelitian dari Bapas menjadi acuan bagi penyidik bahwa penyelesaian perkara bisa dilakukan dengan diversi.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, Pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam upaya tersebut adanya kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku, hal-hal yang harus dilakukan pihak penyidik adalah:

menjelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan secara lengkap disertai bukti-bukti

korban mendukung keterangan yang diberikan polisi.

pengembalian kerugian dengan adanya korban dan dilakukakan dalam batas-batas kewajaran dan tidak melanggar hak-haknya sebagai anak.

penyerahan kembali kepada orang tua atau wali dan orang tua menandatangani surat perjanjian yang telah dibuat, bahwa orang tua akan

menjamin anak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan melakukan pengawasan terhadap anak.

keikutsertaan anak (pelaku) dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Setelah proses itu selesai maka anak dapat tinggal kembali dengan orang tuanya dan tetap bersekolah. Dengan demikian anak tersebut telah belajar dari kesalahannya dan telah melakukan tanggung jawabnya dari kesalahan yang telah diperbuat. Pada saat proses penyelesaian permasalahan anak nakal dengan konsep restoratif justice, pihak tokoh masyarakat tidak perlu hadir dikarenakan akan membuat anak merasa tertekan dan menghindari stigmatisasi yang buruk pada anak tersebut.

Diversi memiliki efek yang positif pada system peradilan karena menghindari stigma negatif dari masyarakat, menghindari pembalasan dari korban. Polisi mempunyai peran penting dalam diversi anak dari sistem peradilan karena polisi merupakan titik pertama persinggungan anak dengan hukum.

Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak penyidik disaat mereka melakukan diversi adalah apabila ada kesepakatan pihak korban untuk meminta ganti kerugian kepada pelaku dan pelaku menyanggupi untuk ganti rugi sesuai batas kemampuan pelaku. Kenyataan yang dilakukan oleh pelaku di luar kesepakatan yaitu sampai batas waktu yang disepakati pelaku tidak meyanggupi untuk mengganti kerugian kepada korban, maka pihak penyidik sesuai

kewajibannya tetap melakukan proses penyidikan sampai ke pengadilan sebagai upaya terakhir.

Penanganan anak melalui model restoratif justice yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), mempunyai manfaat bagi anak yaitu yang terbaik bagi anak, melalui model ini membuat anak tidak ditahan sehingga dapat kembali kepada orang tuanya, dapat kembali bersekolah dan menghindarkan anak dari stigma yang negatif dari masyarakat sekitar, dan teman-temannya. Hal ini akan membuat anak belajar bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengakui kesalahannya di dalam pertemuan dan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan, sehingga anak terhindar dari pengaruh negatif dari sistem peradilan.

Di satu sisi apabila anak mempunyai latar belakang pernah melakukan tindak pidana pada sebelumnya maka Restoratif Justice tidak akan bermanfaat sama sekali bagi anak, dikarenakan anak (pelaku) akan selalu berfikir apabila mengulangi perbuatan tersebut mereka tidak akan ditahan dan akan diselesaikan dengan musyawarah. Menurut hemat penulis hukum pidana dilakukan sebagai upaya terakhir pihak kepolisian dengan memproses sampai ke pengadilan sebagai efek jera bagi pelaku tindak pidana, apabila upaya Restoratife Justice gagal ditempuh.

Konsep penyelesaian permasalahan anak nakal dengan model Restoratif Justice perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan serta

menghindari anggapan bahwa penjara merupakan penyelesaian terbaik bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum. Setidaknya mengurangi pemberian stigma yang negatif terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab – bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum / skripsi ini, yaitu

Penerapan Asas Restoratif Justice terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah dilaksanakan tetapi dalam prakteknya belum maksimal, dikarenakan banyak dari korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak menghendaki diselesaikan secara kekeluargaan tetapi diselesaikan secara hukum.

## **SARAN**

Pihak Kepolisian khususnya penyidik di Polres Sleman agar lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam menangani masalah anak.

Diadakannya pelatihan-pelatihan terhadap penyidik mengenai Restoratif Justice.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini tinduk, 2000, *Sistem Peradilan Anak*, Jakarta.
- Himpunan buku petunjuk pelaksanaan, buku petunjuk lapangan dan buku petunjuk administrasi proses penyidikan tindak pidana*, Lampiran Surat Keputusan Kapolri, 11 september, 2000, jakarta.
- Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- M Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, sinar Grafika, Jakarta.
- Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Poernomo, Bambang. 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, C.V. Mandar Maju.
- Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse ( kekerasan terhadap anak ) Edisi Revisi*, Nuansa, Bandung.



Gatot Supramono, S.H, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta: Djambatan, 2000).

Hilman Hadikusuma, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta, Fajar Agung.

Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.

Asis Safioedin, 1984, *Daftar Kata Sederhana tentang Hukum*, Alumni, Bandung.

Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

### **Jurnal**

Erikwan, Yudha Thama, 2008, faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

### **Internet**

[www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/441](http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/441), 13 september 2013.

<http://repository.unand.ac.id/10424/>13 september 2013.

september 2013.

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com>Http://www.sarjanaku.com/2012/

12/pengertian tindak pidana dan unsur.html.

Http://Uddin76.blogspot.com/2010/07/pengertian tindak pidanadan unsure.html.

Http://Simbolhukum.blogspot.com/2012/06/pencurian.html.

[http://taufikferdiansyah.blogspot.com/2011/07/v-behaviorurldefaultvmlo\\_05.html](http://taufikferdiansyah.blogspot.com/2011/07/v-behaviorurldefaultvmlo_05.html).

[Http://ehvacentre.blogspot.com/restoratif](http://ehvacentre.blogspot.com/restoratif) justice di indonesia, 14 september 2014.

<https://www.facebook.com/notes/koran-fesbuk/penyebab-mengatasi-anak-yang-suka-mencuri/412491969531,21> november,2014

<http://yeremiaindonesia.wordpress.com/tag/pencurian-dengan-kekerasan,12> november, 2014.

JohnLocke,<http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/05/pengertian-anak.html>. diakses7 agustus 2014.

<http://manfaatkanapayanggratisdariinternet.blogspot.com/2011/11/proses-dalam-penyidikan-dan-penuntutan.html.dunia> hukum.

<Http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2013/01/17/restoratifjustice> sebagai alternatif sistem pemidanaan masa depan.

Agustinus Pohan, dalam <http://www.pikiranrakyat.com/>, *Pengadilan konvensional Bukan Cara terbaik Atasi Anak Pelanggar Hukum*, Rubrik Lainnya, tanggal 14 Februari 2004.

Hilda Wirata, dalam <http://www.pikiranrakyat.com/> “*Restorative justice*” *Ciptakan Mediasi Korban*, Rubrik Bandung Raya, tanggal 17 april 2003.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen 3.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153